



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : SATUAN KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDERIMAN BUTAR - BUTAR,
2. Jabatan : KEPALA SATUAN KERJA
3. NHK : 415117

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.022.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m²/25 m² di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. Tanah Seluas 270 m² di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. Tanah Seluas 424 m² di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 222.000.000
4. Tanah Seluas 1102 m² di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/36 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/130 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/130 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 128.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA BK6 M/T /SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BK8 M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, MORRIS MINOR 1000 Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp.



50.000.000

4. MOBIL, DAIHATSU TAFT ROCKY Tahun 1991, HASIL SENDIRI

Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **29.500.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.431.400.866****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **4.610.900.866****III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **4.610.900.866**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.